

**PENGARUH PAJAK PROGRESIF, TINGKAT PENDAPATAN, SANKSI
PAJAK, DAN ETIKA WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN
NASIONALISME SEBAGAI PEMODERASI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Disusun Oleh:

Angia Clara Dwi Saputri

1120 31427

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2024

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

SKRIPSI PENGARUH PAJAK PROGRESIF, TINGKAT PENDAPATAN, SANKSI PAJAK, DAN ETIKA WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN NASIONALISME SEBAGAI PEMODERASI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ANGIA CLARA DWI SAPUTRI

Nomor Induk Mahasiswa: 112031427

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Atika Jauharita Hatta, Dr., M.Si., Ak., CA.

Penguji

Deranika Ratna K., SE., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 1 Juli 2024
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua

Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan nasionalisme sebagai variabel moderasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 20. Data penelitian didapatkan dari penyebaran kuisisioner melalui *g-from* yang ditunjukkan kepada wajib pajak di daerah Kabupaten Magelang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan responden sebanyak 120 wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran PKB, sementara pajak progresif, sanksi pajak, dan etika wajib pajak tidak berpengaruh terhadap pembayaran PKB.

Kata kunci: pajak progresif, tingkat pendapatan, sanksi pajak, etika wajib pajak, nasionalisme, kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of motor vehicle tax (PKB) payment compliance with nationalism as a moderating variable. Data analysis was carried out using multiple linear regression with the help of the SPSS 20 application. Research data obtained from distributing questionnaires through g-from shown to taxpayers in the Magelang Regency area. The sampling technique used was purposive sampling, with 120 taxpayers as respondents. The results of this study indicate that income levels have a positive effect on PKB payment compliance, while progressive tax, tax sanctions, and taxpayer ethics have no effect on PKB payments.

Keywords: progressive tax, income level, tax sanctions, taxpayer ethics, nationalism, taxpayer compliance.

1. Pendahuluan

Latar Belakang

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang menyumbangkan sebesar 70% dari total penerimaan pendapatan negara. Sehingga Indonesia memperoleh sumber pendapatan negara yang memiliki manfaat dan dapat digunakan untuk membiayai

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

keperluan pembangunan negara yang berasal dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah menyumbang jumlah yang besar untuk pendapatan asli daerah. Salah satu jenis penerimaan pajak daerah dapat diperoleh melalui PKB. Pemungutan PKB di setiap daerah dilaksanakan melalui kantor SAMSAT.

Di Kabupaten Magelang jumlah kendaraan bermotor saat ini adalah 435.508 unit, yang berarti kepemilikan kendaraan bermotor tiap tahunnya meningkat sehingga dapat menyebabkan kenaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan di Kabupaten Magelang tahun 2020-2022.

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Magelang			
Jenis	2020	2021	2022
Mobil Penumpang	44.208	46.340	49.875
Bus/Mikrobus	1.021	1.002	1.021
Mobil Beban	18.485	19.207	20.099
Alat Berat	38	38	38
Sepeda Motor	393.271	414.072	435.508
Jumlah	457.023	480.659	506.541

Sumber: BPS Kab. Magelang

Tabel 1.1 menunjukkan adanya kenaikan jumlah kepemilikan sepeda motor pada tahun 2020 - 2022. Salah satu kewajiban pajak yang harus dipenuhi adalah membayar pajak kendaraan bermotor. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor ini disebabkan karena adanya faktor yang memengaruhi wajib pajak untuk membeli kendaraan bermotor yang saat ini menjadi alat transportasi penting dalam kehidupan, namun pada kenyataannya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terjadi tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya.

Kedisiplinan yang ditunjukkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku disebut kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak mencakup pembayaran kewajiban pajak yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tepat waktu, perhitungan yang akurat, dan pelaporan yang akurat. Beberapa faktor diduga memengaruhi kepatuhan pajak dari wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotornya, yaitu pajak progresif, tingkat pendapatan, sanksi pajak, dan etika wajib pajak. Pajak progresif merupakan sistem pemungutan pajak dengan cara menaikkan tarif pajaknya seiring dengan naiknya penghasilan atau nilai objek pajak. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, pemerintah daerah menerapkan pajak progresif yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain dipengaruhi oleh pajak progresif, kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Daya beli seseorang terhadap suatu produk ditunjukkan oleh tingkat penghasilan mereka. Pendapatan memiliki sifat menambah kekayaan atau harta setiap wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaannya didalam negeri maupun luar negeri. Sanksi pajak adalah alat penegakan hukum yang digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sanksi tersebut dapat berupa denda, bunga, atau hukuman pidana bagi wajib pajak yang telah melakukan penghindaran pajak. Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak untuk memberikan efek jera dan pelajaran bagi wajib pajak yang suka melakukan pelanggaran. Etika merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan kebaikan hidup manusia, mengenai perilaku maupun perasaan yang ditunjukkan dalam perbuatan. Wajib pajak yang memiliki etika wajib pajak yang kuat cenderung berpegang pada prinsip moral dan norma sosial yang menekan mereka untuk mematuhi kewajiban dalam membayarkan pajak.

Penelitian ini didasarkan oleh fenomena rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran kendaraan bermotor yang terjadi di Indonesia, sehingga melalui penelitian ini diharapkan wajib pajak dapat memahami pentingnya membayar pajak dan manfaat yang dapat diperoleh. Pada penelitian yang dilakukan oleh Bhegawati, Verawati, & Widyantari (2023) menyebutkan di UPTD Pelayanan dan Retribusi Daerah Provinsi Bali, variabel seperti tarif pajak progresif berdampak negatif terhadap kepatuhan pembayaran pajak sedangkan variabel seperti sanksi, kesadaran, dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Fatmawati dan Adi (2022) menyatakan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bahwa kesadaran pajak dan tingkat pendapatan memengaruhi kepatuhan membayar pajak, namun variabel kualitas pelayanan, tingkat pemahaman, dan sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Progresif, Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, dan Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi.”**

2. Pengembangan Hipotesis

Penelitian yang dilakukan oleh Bhegawati, Verawati, dan Widyantari (2023) membuktikan bahwa variabel pajak progresif berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD Provinsi Bali. Menurut teori atribusi, jika wajib pajak menganggap bahwa kenaikan tarif pajak berdasarkan peningkatan nilai kendaraan bermotor atau penghasilan mereka adalah tidak adil atau terlalu memberatkan, wajib pajak akan cenderung tidak patuh. Ini disebabkan karena pemungut pajak cenderung mencari cara dengan membeli kendaraan atas nama anak atau istri atau saudaranya, untuk menghindari pengenaan tarif pajak progresif tersebut. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat menurun sebagai akibat dari peningkatan beban pajak. Semakin tinggi tarif pajak progresif akan semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

H1: Pajak progresif berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pembayaran PKB

Menurut Fatmawati dan Adi (2022) menyimpulkan bahwa pendapatan berdampak positif pada kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Mengingat pendapatan yang dimiliki berbeda-beda, hal ini akan berdampak pada wajib pajak yang harus membayarkan pajak. Teori atribusi berusaha menjelaskan bagaimana individu memahami penyebab perilaku mereka sendiri dan orang lain. Wajib pajak yang berpendapatan tinggi cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakannya karena mereka tidak perlu mempertimbangkan pembayaran pajak ketika memiliki pendapatan tinggi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H2: Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran PKB

Menurut penelitian Wardani dan Rumiyatun (2017) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak terpengaruh secara signifikan oleh sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Menurut teori atribusi, ketika wajib pajak dihadapkan pada sanksi mereka akan cenderung mengaitkan kepatuhan mereka pada faktor eksternal tersebut untuk menghindari konsekuensi negatif, seperti denda atau tindakan hukum lainnya. Semakin tinggi sanksi perpajakan yang dikenakan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan pajaknya karena wajib pajak enggan untuk membayar pajak yang lebih tinggi sehingga mereka cenderung menghindari sanksi.

H3: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran PKB

Sukmawati dan Awalludin (2017) menyatakan bahwa etika memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan niat membayarkan pajak. Teori atribusi membantu menjelaskan bagaimana wajib pajak yang memiliki etika tinggi cenderung mematuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang etis biasanya memiliki pemahaman mendalam mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan bertanggungjawab secara moral untuk memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, etika wajib pajak yang tinggi memperkuat motivasi intrinsik mereka untuk patuh yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

H4: Etika wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran PKB

Pajak progresif pada kendaraan bermotor yang berarti tarif pajak progresif akan meningkat seiring dengan bertambahnya nilai kendaraan. Hal ini dapat menjadi pendorong yang kuat untuk wajib pajak mematuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang punya rasa nasionalisme tinggi akan lebih cenderung untuk membayar pajak kendaraan. Hipotesis ini memberikan dasar yang kuat untuk gagasan bahwa nasionalisme dapat berfungsi sebagai variabel penting dalam memperkuat hubungan antara kepatuhan pajak kendaraan dan pajak progresif.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H5: Nasionalisme memperkuat pengaruh pajak progresif terhadap kepatuhan pembayaran PKB

Menurut teori atribusi, individu cenderung mencari alasan atau penyebab dibalik perilaku mereka. Wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang tinggi mungkin merasa lebih mampu memenuhi kewajiban pajak mereka, tetapi memotivasi mereka untuk patuh dapat diperkuat oleh rasa nasionalisme. Nasionalisme dapat memoderasi hubungan ini dengan memberikan makna yang lebih besar pada tindakan membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap negara.

H6: Nasionalisme memperkuat pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pembayaran PKB

Teori atribusi dapat digunakan untuk memahami mengapa wajib pajak mematuhi atau tidak mematuhi kewajiban pajak mereka. Namun banyak wajib pajak yang tidak menghiraukan sanksi pajak yang berlaku dan memilih untuk melanggar dengan cara menghindari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sehingga nasionalisme sangat dibutuhkan dalam pencegahan penghindaran pajak. Sanksi pajak, dalam penelitian ini dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki rasa nasionalisme tinggi akan semakin patuh dalam membayar pajaknya, dan berusaha untuk menghindari sanksi agar pembayaran pajaknya tidak semakin tinggi.

H7: Nasionalisme memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran PKB

Dalam teori atribusi, etika wajib pajak dapat dilihat sebagai faktor internal yang memengaruhi kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak akan lebih bangga dengan rasa nasionalisme yang tinggi dan akan cenderung lebih peduli dengan kewajiban membayar pajaknya. Ketika nasionalisme tinggi, etika wajib pajak yang kuat cenderung menghasilkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap kewajiban pajaknya bahkan tanpa adanya sanksi pajak yang dikenakan. Teori atribusi membantu wajib pajak dalam memahami pengaruh etika wajib pajak terhadap kepatuhan pajak yang tidak selalu patuh, tetapi dapat diperkuat atau diperlemah oleh faktor moderasi seperti nasionalisme.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H8: Nasionalisme memperkuat pengaruh etika wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran PKB

3. Metode Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menjadikan wajib pajak kendaraan bermotor yang memiliki lebih dari satu kendaraan sebagai objek penelitian. Objek yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wajib pajak berdomisili di Kabupaten Magelang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Dan proses pengumpulan data dilakukan dengan mendistribusikan kuisioner.

Model Penelitian

Model riset ini menggunakan data model regresi linear berganda yang akan diuji melalui *Moderated Regression Analysis*. Berikut persamaan matematisnya:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_1 Z + \beta_6 X_2 Z + \beta_7 X_3 Z + \beta_8 X_4 Z + \epsilon$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan pajak

α : Konstanta

$\beta_1 - \beta_8$: Koefisien regresi

X_1 : Pajak Progresif

X_2 : Tingkat Pendapatan

X_3 : Sanksi Pajak

X_4 : Etika Wajib Pajak

Z: Nasionalisme

ϵ : Standar eror

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Analisis Data

Uji Validitas

Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	R hitung	R tabel	Hasil Uji
Pajak Progresif (X ₁)	X1	0.864	.178	Valid
	X2	0.870	.178	
	X3	0.865	.178	
	X4	0.826	.178	
	X5	0.720	.178	
Tingkat Pendapatan (X ₂)	X1	0.693	.178	Valid
	X2	0.745	.178	
	X3	0.767	.178	
	X4	0.758	.178	
Sanksi Pajak (X ₃)	X1	0.695	.178	Valid
	X2	0.778	.178	
	X3	0.808	.178	
	X4	0.881	.178	
	X5	0.835	.178	
Etika Wajib Pajak (X ₄)	X1	0.723	.178	Valid
	X2	0.897	.178	
	X3	0.867	.178	
	X4	0.901	.178	
Nasionalisme (Z)	Z1	0.893	.178	Valid
	Z2	0.900	.178	
	Z3	0.907	.178	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0.802	.178	Valid
	Y2	0.812	.178	
	Y3	0.827	.178	
	Y4	0.851	.178	

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Y5	0.854	.178	
--	----	-------	------	--

Berdasarkan kuisioner yang disebar, diperoleh responden atau N yang memenuhi syarat sebanyak 120 dengan tingkat signifikansi 5% sehingga dapat diketahui r-tabel yaitu 0.178. Hasil dari uji validitas terhadap seluruh indikator variabel yang digunakan dalam kuisioner membuktikan bahwa pernyataan tersebut valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai R hitung yang lebih besar dari nilai R tabel.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Item	Cronbach's Alpha	Hasil Uji
Pajak Progresif	5	.883	Reliabel
Tingkat Pendapatan	4	.708	
Sanksi Pajak	5	.858	
Etika Wajib Pajak	4	.862	
Nasionalisme	3	.883	
Kepatuhan Wajib Pajak	5	.886	

Semua variabel menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0.6 seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa variabel pajak progresif, tingkat pendapatan, sanksi pajak, etika wajib pajak, nasionalisme, dan kepatuhan pajak konsisten (*reliable*) dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Std. Deviation	1.83872192
Most Extreme Difference	Absolute	.081
	Positif	.081
	Negatif	-.063
Kolmogorov-Smirnov Z		.893
Asymp. Sig. (2-tailed)		.403

Menunjukkan bahwa pengujian normalitas yang dilakukan menghasilkan nilai Assymp Sig. sebesar 0.403, yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih dari 0.05. Dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini memiliki distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Pajak Progresif	.623	1.605
Tingkat Pendapatan	.426	2.345
Sanksi Pajak	.395	2.532
Etika Wajib Pajak	.484	2.068
Nasionalisme	.461	2.171

Hasil menunjukkan bahwa semua variabel bebas (X) mempunyai nilai *tolerance* > 0.10 serta nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
Pajak Progresif	.937
Tingkat Pendapatan	.656

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sanksi Pajak	.450
Etika Wajib Pajak	.801
Nasionalisme	.471

Hasil ini menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi > 0.05, sehingga dapat membuktikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji *Moderate Regression Analysis*

Tabel 4. 6 Hasil Uji MRA

Variabel	Koefisien Regresi	t	Sig.
(Costant)	8.604	4.459	.000
Pajak Progresif	.235	.659	.511
Tingkat Pendapatan	2.803	4.148	.000
Sanksi Pajak	-1.148	-2.199	.030
Etika Wajib Pajak	-1.118	-1.720	.088
Moderasi X1*Z	-.023	-.826	.410
Moderasi X2*Z	-0.177	-3.308	.001
Moderasi X3*Z	0.087	2.071	.041
Moderasi X4*Z	0.115	2.196	0.30

Menurut hasil perhitungan yang ditunjukkan tabel 4.12, persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y=8.604+0.235(X1)+2.803(X2)-1.148(X3)-1.118(X4)-0.023(X1*Z)-0.177(X2*Z)+0.087(X3*Z)+0.115(X4*Z)+e$$

Berikut adalah penjelasan yang berasal dari hasil persamaan regresi linear, yaitu:

1. Persamaan regresi ini menghasilkan konstanta (α) sejumlah 8.604 artinya apabila variabel independen adalah positif, hal ini bermakna bagi tingkat wajib pajak dalam mematuhi kepatuhan pembayaran pajaknya juga akan tinggi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Variabel pajak progresif, pada persamaan regresi linearnya menghasilkan nilai koefisien sejumlah 0.235 yang diikuti tanda positif. Artinya semakin tinggi pajak progresif yang dikenakan maka semakin tinggi pula wajib pajak akan mematuhi kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel tingkat pendapatan, yang persamaan linearnya menghasilkan nilai koefisien sebesar 2.803 yang diikuti tanda positif, hal ini bermakna jika wajib pajak yang memiliki pendapatan tinggi akan lebih mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak.
4. Variabel sanksi pajak, yang memiliki persamaan linear pada nilai koefisien sebesar -1.148 yang diikuti tanda negatif. Hal ini mengakibatkan semakin rendah sanksi pajak maka semakin rendah juga tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak.
5. Variabel etika wajib pajak, yang memiliki persamaan linear dengan nilai koefisien sebesar -1.118 yang diikuti tanda negatif. Apabila etika wajib pajak yang dimiliki semakin rendah, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan juga semakin rendah.
6. Pada variabel pajak progresif yang dimoderasi oleh nasionalisme, hubungan tersebut memiliki persamaan linear dengan nilai koefisien sebesar -0.023 yang diikuti tanda negatif. Hal ini mengakibatkan apabila nasionalisme yang dimiliki wajib pajak rendah, maka akan mengakibatkan hubungan pajak progresif dan kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi akan semakin rendah juga.
7. Pada variabel tingkat pendapatan yang dimoderasi oleh nasionalisme, hubungan tersebut memiliki persamaan linear dengan nilai koefisien sebesar -0.177 yang diikuti tanda negatif. Hal ini mengakibatkan apabila nasionalisme yang dimiliki wajib pajak rendah, maka akan mengakibatkan hubungan tingkat pendapatan dan kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi akan semakin rendah juga.
8. Pada variabel sanksi pajak yang dimoderasi oleh nasionalisme, hubungan tersebut memiliki persamaan linear dengan nilai koefisien sebesar 0.087 yang diikuti tanda positif. Hal ini mengakibatkan apabila nasionalisme yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dimiliki wajib pajak tinggi, maka akan mengakibatkan hubungan sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi akan semakin tinggi juga.

9. Pada variabel etika wajib pajak yang dimoderasi oleh nasionalisme, hubungan tersebut memiliki persamaan linear dengan nilai koefisien sebesar 0.115 yang diikuti tanda positif. Hal ini mengakibatkan apabila nasionalisme yang dimiliki wajib pajak tinggi, maka akan mengakibatkan hubungan etika wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi akan semakin tinggi juga.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. 7 Hasil Uji R2

R-square	.602
-----------------	-------------

Dihasilkan nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu 0.602, yang berarti kemampuan variabel moderasi dalam menjelaskan variabel independen dan variabel dependen sebesar 60.2% sedangkan sisanya sebesar 39.8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Uji Simultan (F)

Tabel 4. 8 Hasil Uji F

Model	F	Sig.
Regression	34.557	.000

Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian yang digunakan adalah baik, karena nilai sig. yang dihasilkan sebesar $0.000 < 0.05$ yang berarti bahwa variabel X dapat menjelaskan variabel Y dengan baik.

Uji Parsial (T)

Tabel 4. 9 Hasil Uji T

Variabel	Koefisien Regresi	Sig.	Hasil
Pajak Progresif	.235	.511	Hipotesis ditolak
Tingkat Pendapatan	2.803	.000	Hipotesis diterima

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sanksi Pajak	-1.148	.030	Hipotesis ditolak
Etika Wajib Pajak	-1.118	.088	Hipotesis ditolak
Moderasi X1*Z	-.023	.410	Hipotesis ditolak
Moderasi X2*Z	-.177	.001	Hipotesis ditolak
Moderasi X3*Z	.087	.041	Hipotesis ditolak
Moderasi X4*Z	.115	.030	Hipotesis ditolak

Berdasarkan pengujian T pada tabel 4.15 dapat dianalisa sebagai berikut:

- 1) Nilai signifikansi variabel pajak progresif adalah $0.511 > 0.05$, dengan koefisien beta 0.235. H_1 ditolak, yang menyatakan bahwa variabel pajak progresif berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
- 2) Nilai signifikansi tingkat pendapatan adalah $0.000 < 0.05$, dengan nilai koefisien beta 2.803. H_2 diterima, hal ini menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- 3) Nilai signifikansi sanksi pajak adalah $0.030 < 0.05$, dengan koefisien beta sebesar -1.148. H_3 ditolak, hal ini menyatakan bahwa sanksi pajak tidak terdukung karena berpengaruh negatif kepada kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- 4) Nilai signifikansi etika wajib pajak adalah $0.88 > 0.05$, dengan nilai koefisien beta sebesar -1.118. H_4 ditolak, hal ini menyatakan bahwa faktor etika wajib pajak tidak terdukung datanya untuk memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.
- 5) Variabel pajak progresif yang berkaitan dengan nasionalisme sebagai variabel pemoderasi menghasilkan koefisien beta -0.023 dengan tanda negatif. Hal ini berarti nasionalisme sebagai variabel pemoderasi memperlemah hubungan diantara pajak progresif terhadap kepatuhan.
- 6) Variabel tingkat pendapatan yang berkaitan dengan nasionalisme sebagai variabel pemoderasi menghasilkan koefisien beta -0.177 dengan tanda negatif. Hal ini berarti nasionalisme sebagai variabel pemoderasi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

memperlemah hubungan diantara tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 7) Variabel sanksi pajak yang berkaitan dengan nasionalisme sebagai variabel pemoderasi menghasilkan koefisien beta 0.087 dengan tanda positif. Hal ini berarti nasionalisme sebagai variabel pemoderasi memperlemah hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena tidak didukung oleh variabel sanksi pajak yang tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 8) Variabel etika wajib pajak yang berkaitan dengan nasionalisme sebagai variabel pemoderasi menghasilkan koefisien beta 0.115 dengan tanda positif. Hal ini berarti nasionalisme sebagai variabel pemoderasi memperlemah hubungan diantara etika wajib pajak dalam hal kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan variabel etika wajib pajak tidak didukung dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.

Pembahasan

Pajak Progresif Berpengaruh Negatif Terhadap Kepatuhan Pembayaran PKB

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial terhadap variabel pajak progresif wajib pajak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0.511 > 0.05$, yang membuktikan bahwa variabel pajak progresif tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini dipengaruhi oleh variabel pajak progresif yang kurang dimengerti oleh wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu.

Tingkat Pendapatan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pembayaran PKB

Hasil pengujian secara parsial terhadap variabel tingkat pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0.000 < 0.05$, yang berarti tingkat pendapatan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Alasan utama mengapa hasil penelitian ini didukung adalah karena wajib pajak dengan pendapatan yang tinggi cenderung memiliki kemampuan finansial yang baik untuk memenuhi kewajiban mereka dalam

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

membayar pajak. Dengan tingkat pendapatan yang tinggi memberikan ketersediaan dana yang lebih besar untuk membayarkan pajak tepat waktu, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pembayaran PKB

Hasil pengujian secara parsial membuktikan bahwa variabel sanksi pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan ini berdasarkan pengujian dengan nilai signifikansi sebesar $0.030 < 0.05$ dan nilai koefisien sebesar -1.148 . Salah satu alasan utama mengapa hasil penelitian ini tidak terdukung karena ketakutan atau kekhawatiran terhadap sanksi pajak yang mungkin tidak cukup kuat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, wajib pajak tidak menyadari atau memahami sanksi yang diberlakukan dan merasa sanksi yang akan dikenakan relatif rendah.

Etika Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pembayaran PKB

Hasil pengujian secara parsial membuktikan bahwa variabel etika wajib pajak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan ini berdasarkan pengujian dengan nilai signifikansi sebesar $0.088 > 0.05$. Alasan utama mengapa hipotesis ini tidak terdukung karena meskipun wajib pajak memiliki etika yang tinggi, faktor lain seperti tingkat ekonomi dan keyakinan wajib pajak lebih memengaruhi dalam kepatuhan pembayaran pajak.

Nasionalisme Memperkuat Hubungan Pajak Progresif Terhadap Kepatuhan Pembayaran PKB

Hasil pengujian secara parsial membuktikan bahwa nasionalisme tidak memiliki pengaruh secara signifikan dalam memoderasi hubungan pajak progresif dengan kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan ini berdasarkan pengujian dengan nilai koefisien yang bernilai negatif -0.023 . Ini menunjukkan bahwa nasionalisme tidak meningkatkan keterkaitan antara pajak progresif dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Magelang. Wajib pajak yang terbebani dengan tarif pajak yang meningkat akan enggan membayarkan pajaknya dengan tepat waktu meskipun memiliki rasa nasionalisme yang tinggi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Nasionalisme Memperkuat Hubungan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Pembayaran PKB

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa nasionalisme sebagai pemoderasi tidak memengaruhi hubungan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan. Kesimpulan ini berdasarkan pengujian dengan nilai koefisien yang negatif sebesar -0.177 . Nasionalisme tidak memberikan pengaruh yang signifikan karena tingkat pendapatan tidak memperkuat kontribusinya dalam kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak memiliki keinginan untuk berkontribusi pada pertahanan negara dan pembangunan, yang mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam tingkat pendapatan wajib pajak akan tetap patuh dalam melakukan pembayaran pajak karena rasa nasionalisme mereka bukan hanya karena kemampuan finansial.

Nasionalisme Memperkuat Hubungan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran PKB

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa nasionalisme sebagai pemoderasi tidak memengaruhi secara signifikan hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan ini berdasarkan pengujian dengan nilai koefisien sebesar 0.087 . Salah satu alasan yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak adalah kesadaran akan hukum dan norma sosial yang rendah sehingga mengakibatkan wajib pajak yang memiliki rasa nasionalisme rendah akan melakukan penghindaran dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan individu yang memiliki rasa nasionalisme tinggi, tidak membayarkan pajak karena tidak ingin uang yang mereka bayarkan digunakan pemerintah yang tidak kompeten untuk korupsi sehingga wajib pajak akan menghindari membayarkan pajaknya.

Nasionalisme Memperkuat Hubungan Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran PKB

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa nasionalisme sebagai variabel pemoderasi tidak memengaruhi secara signifikan hubungan etika wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan ini berdasarkan pengujian dengan nilai koefisien sebesar 0.115 . Kurangnya keyakinan mengenai kewajiban moral dan rendahnya etika yang dimiliki wajib pajak untuk berbuat jujur dalam hal perpajakan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang berhubungan dengan perilakunya dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang mengakibatkan rendahnya rasa nasionalisme yang dimiliki dan menimbulkan sikap tidak patuh terhadap pembayaran pajak.

5. Simpulan

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling menentukan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah tingkat pendapatan, sedangkan pajak progresif, sanksi pajak, dan etika wajib pajak bukanlah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Hal ini mungkin disebabkan karena tingkat pendapatan dapat langsung memengaruhi kemampuan finansial wajib pajak untuk membayarkan pajak, sehingga menjadi faktor utama yang memengaruhi kepatuhan. Hasil penelitian secara keseluruhan berhasil memberikan dukungan pada teori atribusi yang digunakan, terutama melalui tingkat pendapatan wajib pajak. Hasil penelitian memberikan implikasi bahwa kebijakan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dibandingkan dengan penerapan sanksi atau perubahan etika pajak.

Keterbatasan Penelitian

Kendala yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu keterbatasan ruang lingkup responden dan banyak wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, I., Saputra, H., & Imanda, A. (2019). *Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan di PT Jasaraharja Putra Cabang Bengkulu*. Retrieved from Profesional : Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik, No.6: <https://doi.org/10.37676/professional.v6i1.837>
- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 15-23.
- Algifari. (2018). *Statistitika Deskriptif Plus Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Andini, T., & Pramana, E. (2019). Penentuan Faktor Kredibilitas Toko Online Melalui Pendekatan Peran Estetika Secara Impiris. *Snatika*, 03, 12-21.
- Anggraeni. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Awaluddin, & Murtiadi. (2017). Implikasi Theory of Reasoned Action dan Etika Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Niat. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Awaluddin, M., & Sukmawati, S. (2017). Implikasi Theory Of Reasoned Action Dan Etika Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Niat. *garuda.kemendikbud.go.id*.
- Bhegawati, D. A., Verawati, Y., & Widyantari, G. A. (2023). Pengaruh Tarif Pajak Progresif, Kualitas Pelayanan, Sanksi, Kesadaran, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Vol. 02 No. 01 (2023) 01 - 06*, 17-23.
- Dustin, & Aristo, S. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Etika Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Ber.
- Ermawati, E., & Widiastuti, N. E. (2014). Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal InFestasi*, 103-114.
- Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11 No. 1 Juli 2022, 883-890.
- Ghozali, H. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Edisi 9*. Semarang: BP UNDIP Semarang.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryani, & Putra. (2023). Pengaruh Literasi AKuntansi Dan Financial Planning Terhadap Komitmen Patuh Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Variabel Pemoderasi. *journal.uta45jakarta.ac.id*.
- Haryani, S., & Putra, R. R. (2023). Pengaruh Literasi Akuntansi Dan Financial Planning Terhadap Komitmen Patuh Pajak Dengan Nasionalisme sebagai Variabel Pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 40-53.
- Haswidar. (2016). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.
- Ilhamsyah, R., Endang, & Dewantara. (2018). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1-9.
- Isawati, T., K, H., E. S., & Ruliana, T. (2016). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasis Di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu). *ekonomia17 agustus 1945 Samarinda*, 5(3), 1-8.
- Isnaini, & Karim. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Vol.3 No. 1 (2021): PAY Jurnal Keuangan dan Perbankan*.
- Juliantari, N. K., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. G. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *JURNAL KHARISMA Vol. 3 No. 1, Februari 2021*, 128-139.

Karlina, & Ethika. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Audit*.

Kautsar, M. (2017). Pengaruh Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Wacana Ekonomi, Vol. 16, No. 2*.

Latrini, & Gayatri. (2018). Pengaruh Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Atas Berlakunya Perda Nomor 8 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.

Magelang, B. G. (2020, Desember). Retrieved from <https://magelangkab.bps.go.id/indicator/17/575/1/potensi-kendaraan->

Manurung, P. A., Sriwiyanti, E., & Saragih, M. (2022). Pengaruh Tarif Pajak Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah AccUsi VOLUME 4 No 2 Nov 2022*, 118-136.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Nurmantu. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Oktaviana, R., Hardiningsih, P., & Srimindari, C. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Akuntansi, XXI(2)*, 1-18.

Oktaviani, Hardiningsih, & Srimindari. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi*.

Pangalila, I. I., Ilat, V., & Runtu, T. (2015). Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 9-16.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Putri, & Jati. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar. *Jurnal Akuntansi*, 661-677.
- Putri, purbasari, Handayani, & Ulynnuha. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Rahma, F. A., Maulana, M. H., Ahoinei, M. F., & Hatta, A. J. (2022). Mampukah Moralitas Memoderasi Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor? *Vol. 32 No. 12*, 3535-3551.
- Riadi. (2020). *Populasi dan Sampel Penelitian (Pengertian, Proses, Teknik Pengambilan dan Rumus)*. Retrieved from [Www.Kajianpustaka.Com](https://www.kajianpustaka.com/2020/11/populasi-dan-sampel-penelitian.html), 2020, 1-4: <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/populasi-dan-sampel-penelitian.html>
- Selani, M. M. (2020). PENGARUH PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR STUDI KASUS DI SAMSAT CIKOKOL KOTA TANGERANG. .
- Siahaan. (2013). *PAjak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, A. M., & Andrianti , H. N. (2019). PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TARIF PROGRESIF DAN PENDAPATAN WAJIB PAJAK TERHADAP DAYA BELI KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Volume 14, Nomor 2, November 2019: 124–139*, 124-139.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Tambun, A., & Haryati, A. (2022). Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *LRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*. 13(2), 278-289.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (n.d.).
- Utami. (2006). Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (ppnbn) Terhadap Daya Beli Konsumen Alat Fotografi. *maranatha edu*.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JURNAL AKUNTANSI VOL. 5 NO. 1 JUNI 2017*, 15-24.
- Wenzel, M. (2005). Motivation or Rationalsiation? Casual Relations Between Ethnics, Norms and Tax Compliance. *Journal of Economic Psychology*, 491-508.
- Wiryanto, Sadiati, & Afif. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Akunida Vol.5 No.2*.
- Wisesa, A. (2011). Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis. *Institut Teknologi Bandung*.